

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan teori

1.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018:1) dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, perusahaan milik Negara/Daerah dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Akuntansi sektor publik adalah proses pembukuan, pencatatan, klasifikasi, analisis, peringkasan serta komunikasi dan interpretasi semua informasi keuangan pemerintah yang dilakukan secara detail dan agregat. bagian ini juga meliputi pencatatan seluruh transaksi yang termasuk transfer, diposisi dan dipenerimaan properti serta dana publik.

Terdapat juga pendapat beberapa ahli terkait:

1. Ratmono mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai proses pengukuran, identifikasi, pencatatan, serta pelaporan seluruh transaksi keuangan dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengambil keputusan ekonomi.
2. Erlina dkk menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang berguna untuk mencatat kegiatan ekonomi suatu organisasi nirlaba atau non-

profit. Sederhananya *publik sector accounting* umumnya digunakan oleh organisasi sektor publik seperti: Masjid, Rumah Sakit, Puskesmas, Universitas/Sekolah, Partai Politik, LSM hingga Pemerintah Pusat.

1.1.1.1 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan akuntansi sektor publik adalah *management control*. *management control* adalah memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam pengelolaan yang tepat, efisien dan ekonomis pada operasi alokasi sumber daya suatu organisasi atau lembaga, tujuan dari akuntansi sektor publik yang terdiri dari tujuh yaitu sebagai berikut :

1. Berguna untuk menunjukkan kepemilikan transaksi dan kesesuaian transaksi tersebut dengan aturan, hukum dan regulasi yang ada.
2. Mengukur kinerja sektor publik saat ini dan memberi informasi untuk mengendalikan manajemen operasi pemerintah yang efisien dan efektif.
3. Melakukan perencanaan operasi dimasa depan dan menilai efisiensi serta efektifitas yang pihak yang berwenang.
4. Memastikan legalitas transaksi kesesuaiannya dengan Undang-Undang peraturan dan norma yang berlaku.
5. Membantu perencanaan dan pengendalian serta membantu melakukan laporan yang tepat waktu dan objektif.
6. Seorang akuntan sektor publik juga harus membentuk organisasi dalam memberikan dasar dalam mengambil keputusan penting.
7. Memberikan solusi jika ada masalah dalam organisasi tersebut serta meningkatkan efisiensi manajemen.

Menurut Mardiasmo (2018:18) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk menelora secara cepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberi informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif atas program penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

1.1.1.2 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018) akuntansi adalah suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purposive activity*). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang memengaruhi.

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan *turbelence*. Komponen lingkungan yang memengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultural dan demografi.

1. Faktor Ekonomi

- a. Pertumbuhan ekonomi
- b. Tingkat inflasi
- c. Pertumbuhan pendapatan perkapita
- d. Struktur produksi
- e. Tenaga kerja
- f. Arus modal dalam negeri
- g. Cadangan devisa
- h. Nilai tukar mata uang
- i. Utang dan bantuan luar negeri
- j. Infrastruktur
- k. Teknologi
- l. Kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi
- m. Sektor informasi

2. Faktor Politik

- a. Hubungan Negara dengan masyarakat
- b. Legitimasi pemerintah
- c. Tipe rezim yang berkuasa
- d. Ideologi negara
- e. Elit politik dan massa
- f. Jaringan internasional
- g. Kelembagaan

3. Faktor Kultural

- a. Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
- b. Sistem nilai di masyarakat
- c. Historis
- d. Sosiologi masyarakat
- e. Karakteristik masyarakat
- f. Tingkat pendidikan

4. Faktor Demografi

- a. Pertumbuhan penduduk
- b. Struktur usia penduduk
- c. Migrasi
- d. Tingkat kesehatan

1.1.2 Kinerja Keuangan

Menurut Kurrohman (2013) kinerja keuangan merupakan isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penganggaran belanja publik, maka diperkenalkannya sistem penganggaran yang berbasis kinerja (*performance based budgeting*) sebagai pengganti sistem penganggaran lama dengan sistem tradisional yang bersifat *incrementalism* dan struktur susunan anggarannya bersifat *line item*.

Bastian (2006:274) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai

oleh organisasi dalam periode tertentu. Beberapa pihak berpendapat bahwa kinerja mestinya didefinisikan sebagai hasil kerja itu sendiri (*outcomes of work*) karena hasil kerja memberikan hubungan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategi organisasi, kepuasan pelanggan dan kontribusi ekonomi.

1.1.2.1 Pengukuran Kinerja

Menurut Rantebalik (2016) pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan). Hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Menurut Pratiwi dan Ela (2017) pengukuran kinerja adalah faktor penting didalam suatu organisasi termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik dan tepat sasaran.

Menurut Yulitiawati dan Rusmidarti (2021) pengukuran kinerja adalah alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan dukungan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas.

Menurut Mardiasmo (2018:103) sistem pengukuran kinerja publik yaitu suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur *finansial* dan *non finansial*. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*. Terdapat tiga pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi yaitu: 1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimasukkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik. 2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 3. Untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

1.1.2.2 Indikator Kinerja

Menurut Kurrohman (2013) indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif. Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian yaitu: 1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisien) dan 2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas).

Menurut Mardiasmo (2018:160) indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Untuk mengukur kinerja pemerintah maka perlu

diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan dan pengendalian
2. Spesifikasi teknis dan standarisasi
3. Kompetensi teknis dan profesionalisme
4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar
5. Mekanisme sumber daya manusia

Peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain:

1. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi
2. Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan
3. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial
4. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan
5. Untuk menunjukkan standar kinerja
6. Untuk menunjukkan efektivitas
7. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas yang paling baik untuk mencapai target sasaran
8. Untuk menunjukkan wilayah, bagaian atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya

1.1.2.3 Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Mardiasmo (2018:103) sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

Menurut Kurrohman (2013) anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran Negara (pengeluaran Negara) dengan hasil yang diinginkan (*output* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanafaatannya. *Performance based budgeting* dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan *output* dan *outcome* yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik.

1.1.2.4 Tahap-tahap penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Nordiawan (2006:79) tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja sebagai berikut:

1. Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi)

Penetapan visi dan misi merupakan tahap pertama yang harus ditetapkan suatu organisasi dan menjadi tujuan tertinggi yang hendak dicapai sehingga setiap indikator kinerja harus dikaitkan dengan komponen tersebut. Oleh karena

itu, penentuan komponen-komponen tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi juga mengikutsertakan masyarakat sehingga dapat diperoleh informasi mengenai kebutuhan publik.

2. Menentukan Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

3. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Kegiatan ini meliputi penyusunan peringkat-peringkat alternatif dan selanjutnya mengambil keputusan atas program/kegiatan yang dianggap menjadi prioritas Nordiawan (2006:79). Dilakukannya pemilihan dan prioritas program/kegiatan karena mengingat sumber daya yang terbatas. Berdasarkan penjelasan umum atas PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, ditegaskan bahwa penerapan PBK paling sedikit mengandung 3 (tiga) prinsip, yaitu:

- a. Prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada fungsi unit kerja yang diletakkan pada struktur organisasi (*money follow function*)
- b. Prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*)

- c. Prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manage*).

1.1.2.5 Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Rantebalik dkk (2016) keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undang efisiensi, ekonomis, efektifitas, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Suprpto (2006) dalam Fadul (2019) menyebutkan salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu organisasi atau badan, perlu dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari organisasi atau badan yang bersangkutan dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya.

1.1.3 Value For Money

Menurut Mardiasmo (2018) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu :

1.1.3.1 Ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cash of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa *input* dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian, pada hakikatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi, karena keduanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*). Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar.

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}}$$

Tabel 2.1
Kriteria Ekonomis

Presentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang Dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber : Tim Litbang Depdagri (Bisma dan Heri, 2010)

1.1.3.2 Efisiensi

Efisiensi yaitu berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang

dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya untuk PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi

Presentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efisiensi
90%-100%	Efisiensi
80%-90%	Cukup Efisiensi
60%-80%	Kurang Efisiensi
Kurang Dari 60%	Tidak Efisiensi

Sumber : Tim Litbang Depdagri (Bisma dan Heri, 2010)

1.1.3.3 Efektivitas

Efektivitas yaitu berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending well*).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD berdasar potensi riil}}$$

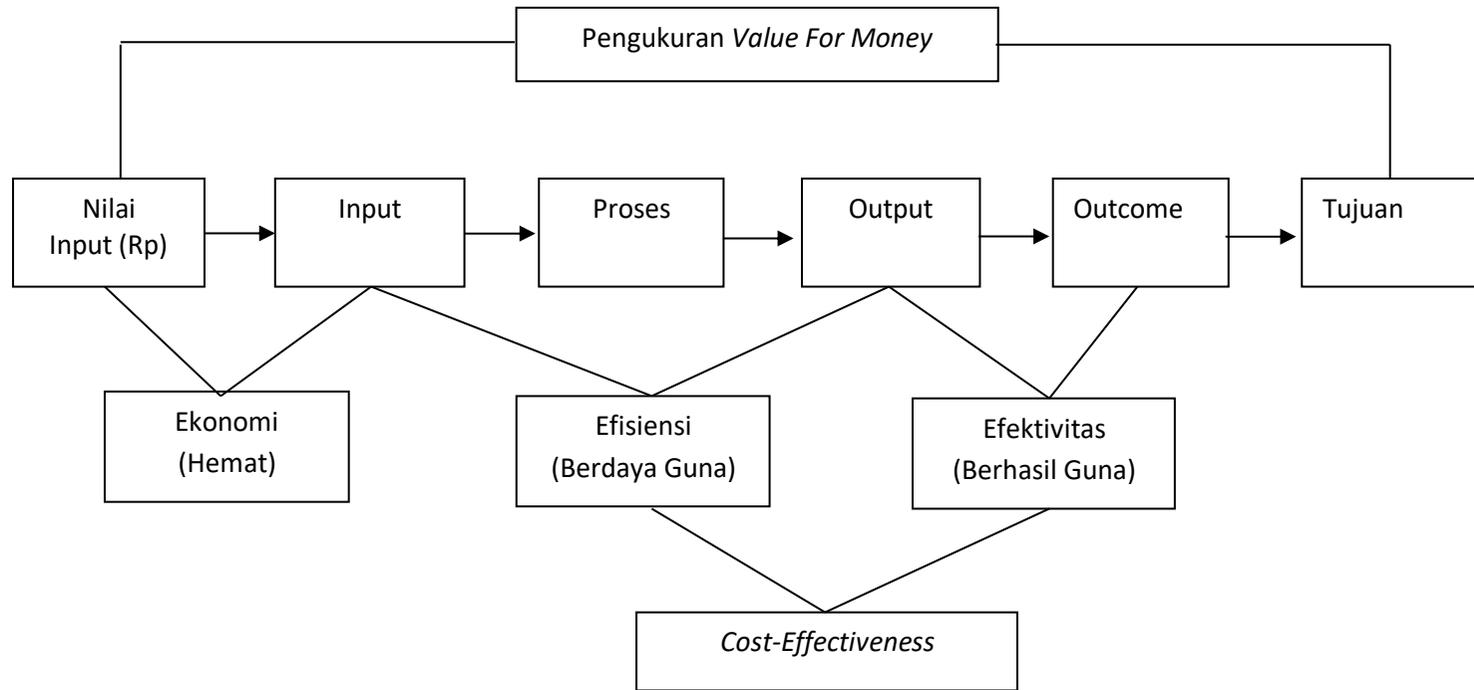
Tabel 2.3
Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektivitas
90% -100%	Efektivitas
80% -90%	Cukup Efektivitas
60% -80%	Kurang Efektivitas
Kurang Dari 60%	Tidak Efektivitas

Sumber : Tim Litbang Depdagri (Bisma dan Heri, 2010)

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa ketiga pokok bahasan dalam *value for money* sangat terkait satu dengan yang lainnya. Ekonomi membahas mengenai masukan (*input*), efisiensi membahas masukan (*input*), keluaran (*output*) dan efektivitas membahas mengenai keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*). Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1.1.3.4 Pengukuran *Value For Money*



Gambar 2.1
Pengukuran *Value For Money*
Sumber: Mardiasmo (2018:6)

1.2 Peneliti Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Dan Metode Analisis Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Amelia Ika Pratiwi Dan Ela Nursandia (2017)	Analisis Pengukuran Kinerja <i>Value For Money</i> Pada Badan Pengelolaan Keuangann Dan Aset Daerah Kabupaten Blitar	- Ekonomi - Efisiensi - Efektivitas	Hasil Penelitian Menunjukkan Dari Segi Ekonomis Sudah Ekonomis, Dari Segi Efisiensi Telah Menjalankan Programnya Secara Efisien Dan Dari Segi Efektivitas Cukup Baik.
2.	Bonilisa Rantebalik, Tawakkal Dan Anna Sutrisna S	Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu. Vol 9. No 2, Oktober 2016	- Rasio Derajat Desentralisasi - Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah - Rasio Efektifitas - Analisis Varians Belanja - Rasio Efisiensi Belanja	Hasil Penelitan Menunjukkan Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tana Toraja Umumnya Cukup Baik.
3.	Suci Deviana Ruffit Dan Desmiwerita	Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar. Pareso Jurnal, Vol 2. No 2, Juni 2020	- Rasio Derajat Desentralisasi - Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah - Rasio Efektifitas - Analisis Varians Belanja - Rasio Efisiensi Belanja	Hasil Penelitian Keseluruhan Menunjukkan Kinerja Pengelolaan APBD Kabupaten Tanah Datar Masih Belum Cukup Baik, Untuk Itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Hendaknya Berusaha Mencapai Target Pendapatan Sehingga Daerah Bisa Lebih Baik.
4.	Lis Djuniar ¹ Dan Ida Zuraida ²	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal Dan Sisa Lebih	- PAD - Belanja Modal - SILPA	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Pendapatan Asli Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja

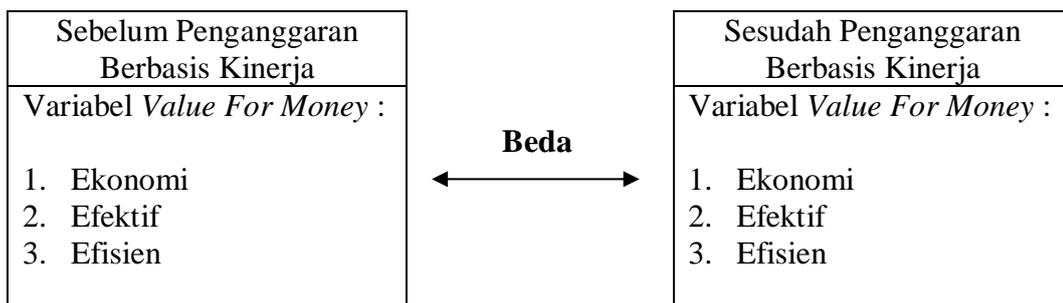
		Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Kinerja pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Vol 3. No 2, November 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Pemerintah Daerah - Analisis Regresi Linier Berganda 	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, Belanja Modal Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
5.	Alfin Luthfiyatur Rusydah Dan Titik Mildawati.	Penerapan Konsep <i>Value For Money</i> Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Publik. Vol 5. No 11, Desember 2016.	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Ekonomi - Rasio Efisiensi - Rasio Efektivitas 	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Laporan Kinerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Ditinjau Dari Segi Ekonomi Dapat Dikatakan Ekonomis Terlihat Dari Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Dimana Dana Anggaran Yang Digunakan Untuk Menjalankan Kegiatan Tersebut Sebesar 95%. Segi Efisiensi Dapat Dikatakan Efisien Dilihat Dari Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Yang Menghasilkan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Dan Penetapan Wajib Pajak Daerah Mencapai 100% Dengan Menggunakan Anggaran Sebesar 77,43%. Segi Efektivitas Dapat Dilihat Dari Tercapainya Pajak Daerah Yang Dihasilkan Sebesar 98,24%. Sehingga <i>Outcome</i> Hampir Mencapai 100% Dan Dapat Dikatakan Efektif.
6.	Taufik	Evaluasi Penganggaran	- Rasio Ekonomi	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan

	Kurrohman (2013)	Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangann Yang Berbasis <i>Value For Money</i> Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol 5, No 1, Maret 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Efisiensi - Rasio Efektivitas 	Pemerintah Daerah Lebih Ekonomis Dan Efisien Dalam Penelolaan Keuangannya Setelah Menggunakan Anggaran Berbasis Kinerja.
7.	Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiathi Dan Ni Luh Supadmi	Pengaruh PAD, DAU Dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemodersi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 477-495, ISSN: 2302-8556.	-	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan PAD, DAU Dan SILPA Berpengaruh Positif Dan Signifikan Pada Belanja Modal Di Kabupaten/ Kota Di Provinsi Bali
8.	Tri Siwi Nugrahani Volume 1, 2007	Analisis Penerapan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Ekonomi - Rasio Efisiensi - Rasio Efektivitas 	Apabila Melakukan Penilaian Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money, Maka Kinerja Keuangan Pemda DIY Cukup Ekonomis Dan Efisien Tetapi Kurang Efektif.
9.	Supriyadi, Armandelis Dan Selamat Rahmadi Vol. 1 No. 1, Juli 2013 ISSN: 2338- 4603	Analisis Desentralisasi Fiskal Di Kabupaten Bungo	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Kemandirian Daerah 	Menyatakan Bahwa PDRB Memiliki Hubungan Yang Positif Dan Signifikan Dengan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Di Kabupaten Bungo Tidak Dapat Diterima Sepenuhnya. Hal Ini Karena Satu Dari Tiga Hubungan Antara PDRB Dengan DDF Hasilnya Negatif Dan Tidak Signifikan Yaitu

				Hubungan Antara PDRB Dengan DDF PAD.
10.	Anjar Nora Vurry, I Wayan Suwendra Dan Fridayana Yudiaatmaja. Vol. 4 No. 2, Bulan Oktober Tahun 2018 P-ISSN: 2476-8782	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Kemandirian - Rasio Efektivitas PAD - Rasio Efisiensi PAD - Rasio IKR - Trend Kemandirian Keuangan 	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa (1) Rasio Kemandirian Keuangan Termasuk Dalam Kategori Rendah Sekali (2) Rasio Efektivitas PAD Termasuk Dalam Kategori Sangat Efektif, (3) Rasio Efisiensi PAD Termasuk Dalam Kategori Sangat Efisien, (4) Rasio IKR Termasuk Dalam Kategori Sangat Kurang Dan (5) Trend Kemandirian Keuangan, Efektivitas, IKR Menunjukkan Arah Perkembangan Yang Positif Begitu Pula Dengan Peramalannya Di Tahun 2014-2016, Dan Trend Efisiensi Menunjukkan Arah Perkembangan Negatif Begitu Pula Dengan Peramalannya Di Tahun 2014-2016.
11`	Yulitiawati (2020)	Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan <i>Value For Money</i> Di Kabupaten OKU	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Ekonomi - Rasio Efisiensi - Rasio Efektivitas 	Penelitian Menunjukkan Bahwa (1) Rasio Ekonomis APBD Oku Dikategorikan Ekonomis (2) Tingkat Efisiensi Berada Pada Kategori Cukup Efisien (3) Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan Dikategorikan Efektif.

1.3 Kerangka pemikiran

. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis rasio kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari rasio ekonomis, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Sebelum penerapan sistem penganggaran kinerja keuangan berbasis *value for money* dan sesudah penerapan penganggaran kinerja keuangan berbasis *value for money* merupakan *cut off*. Sehingga dalam penelitian ini membandingkan kinerja keuangan pemerintah sebelum tahun 2004-2006 dan sesudah tahun 2019-2021 penerapan sistem penganggaran kinerja keuangan berbasis *value for money*. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan gambar berikut ini:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

1.4 Hipotesis

Menurut Sujarweni (2015:68) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang di turunkan dari kerangka pemikir yang telah di buat Hipotesis merupakan pernyataan penelitian tentang hubungan antara dua varabel atau lebih. Dengan kata lain hipotesis dapat disimpulkan pernyataan tentatif mengenai pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dari penjelasan diatas

bahwa hipotesis ini adalah dugaan sementara dari jawaban rumusan dalam masalah penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga ada perbedaan sebelum dan sesudah penerapan sistem penganggaran kinerja keuangan berbasis *value for money* pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada rasio ekonomis.
2. Diduga ada perbedaan sebelum dan sesudah penerapan sistem penganggaran kinerja keuangan berbasis *value for money* pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada rasio efisiensi.

Diduga ada perbedaan sebelum dan sesudah penerapan sistem penganggaran kinerja keuangan berbasis *value for money* pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan